

KERANGKA ACUAN KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran

Nama PPK : MAISARAH, SE

Tahun Anggaran 2023

Kerangka Acuan Kerja

Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran

1.	Latar Belakang Saat ini belanja jasa tenaga administrasi perkantoran pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kontrak kerja dengan PT. Tiga Saudara Solution, sehubungan dengan adanya kekurangan anggaran pada DPA tahun 2023 untuk jasa tenaga administrasi perkantoran yang hanya dianggarkan selama 11 bulan dan belum adanya keputusan mengenai kelangsungan kontrak tenaga outsourcing pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara
2.	Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan pengadaan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran adalah untuk memenuhi kekurangan gaji tenaga administrasi perkantoran selama 1 bulan.
4.	Nama Organisasi Pengadaan Jasa Instansi yang melakukan pengadaan Belanja Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Utara untuk kepentingan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Utara dan 33 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara.
5.	Sumber Dana dan Perkiraan Biaya Sumber dana untuk membiayai gaji Tenaga Administrasi Perkantoran ini adalah P. APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 sesuai dengan RKA P.APBD tahun anggaran 2023 dengan tetap mengacu kepada UMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2023. HPS sebesar 1.382.903.250,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah). Apabila dana tidak tersedia dalam DPA P.APBD atau terdapat perubahan nilai dalam pagu anggaran DPA P.APBD ataupun adanya ketentuan lainnya yang dapat mempengaruhi nilai kontrak maka Pengguna Jasa tidak dapat dituntut dalam bentuk apapun dan kontrak akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia
6.	Ruang Lingkup Pengadaan/Lokasi dan Fasilitas Penunjang Terdapat 3 (tiga) jenis Tenaga Administrasi Perkantoran yang penempatannya menurut kebutuhan BAPENDASU yaitu :

	<p>1) Operator Komputer yang ditempatkan di kantor BAPENDA Prov. Sum Utara. 2) Pendamping Operator Jaringan Online yang ditempatkan di Bidang PSIPD (Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah). 3) Pendamping Penagihan Tunggakan Pajak Daerah untuk ditempatkan di 33 Unit Pelaksana Teknis BAPENDA yang tersebar di Kabupaten Kota.</p> <p>Administrasi Pengadaan dilakukan secara terpusat di BAPENDASU namun penempatannya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kantor BAPENDA Provinsi Sumatera Utara, dan ➤ Tersebar di 33 Unit Pelaksana Teknis BAPENDA di Kabupaten/Kota se Sumatera Utara. <p>Fasilitas Penunjang yang harus disediakan oleh Instansi BAPENDA dan 33 Unit Pelaksana Teknis adalah menyediakan Prasarana dan Sarana bagi Tenaga Administrasi Perkantoran.</p>
7.	<p>Produk yang Dihasilkan</p> <p>Kegiatan ini adalah berupa Jasa manajemen gaji Tenaga Kerja Administrasi Perkantoran sesuai dengan jumlah kontrak sebelumnya yaitu 425 orang untuk dipekerjakan membantu ASN di lingkungan BAPENDA Prov. Sum. Utara dan di 33 UPT yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Utara</p>
8	<p>Lama Pelaksanaan Yang Diperlukan</p> <p>Pelaksanaan pekerjaan ini selama 1 bulan terhitung mulai bulan 1 Desember 2023 sampai dengan bulan 31 Desember 2023</p>
9	<p>Persyaratan tenaga kerja yang dibutuhkan</p> <p>Tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 425 orang sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kontrak sebelumnya dengan kualifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mempekerjakan Tenaga Kerja yang sudah ada (existing) 2) Pendidikan Minimal SMA/SMU Sederajat, 3) Usia minimum 18 tahun maksimal 50 tahun 4) Mampu mengoperasikan komputer minimal microsoft office,
10	<p>Persyaratan Teknis Penyedia</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Metode pekerjaan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan b. Bagan/struktur kerja perusahaan c. Memiliki personil/penanggung jawab perusahaan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1 orang Manager lapangan pendidikan minimal S1, memiliki sertifikat K3 umum dengan pengalaman minimal 3 tahun 1 orang pelaksana administrasi pendidikan minimal SMA pengalaman minimal 3 tahun 1 orang pelaksana keuangan pendidikan minimal SMA Pengalaman minimal 3 tahun

	<p>Masing-masing personil harus pegawai tetap perusahaan yang dibuktikan dengan bukti potong pajak PPh, Curriculum Vitae, Ijasah dan data identitas diri</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Memiliki kantor perwakilan di medan untuk penyedia yang berdomisili di luar kota medan dengan melampirkan bukti kepemilikan / bukti sewa dan tercantum dalam akta perusahaan e. Membuat surat pernyataan akan membayarkan gaji para tenaga kerja paling lama tanggal 5 untuk untuk setiap bulannya f. Memiliki peralatan utama minimal <ul style="list-style-type: none"> 1. computer/laptop 3 unit dengan melampirkan bukti kepemilikan /sewa 2. peralatan kantor seperti meja 3 unit dan kursi kerja 3 unit dengan melampirkan bukti kepemilikan/sewa 3. mobil sebanyak 4 unit yang terdiri dari 3 unit minibus/ penumpang dan 1 unit mobil barang dengan kapasitas minimal 1480 cc yang akan digunakan untuk kunjungan ke UPT-UPT dengan melampirkan bukti kepemilikan/sewa dan bersedia diklarifikasi serta keempat unitnya harus berdomisili dimedan <p>NB : Seluruh peralatan wajib melampirkan foto dokumentasi dan dapat dibuktikan pada saat klarifikasi peralatan dan unit harus berada di medan</p>
11	<p>Persyaratan Kualifikasi Penyedia</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SIUP kualifikasi non kecil b. NIB dengan KBLI N 78200 dan N 82110 c. Memiliki tempat usaha yang jelas dan benar sesuai dengan Surat keterangan domisili usaha yang masih berlaku dengan melampirkan foto tempat usaha/kantor d. Melampirkan akta pendirian dan perubahan terakhir (apabila ada) yang disahkan oleh kemenkumham e. NPWP Perusahaan dan KSWP berstatus valid f. Memiliki sertifikat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan g. Surat ijin operasional penyedia tenaga kerja dari instansi ketenagakerjaan setempat yang masih berlaku h. Memiliki Tanda Pendaftaran Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku dari dinas ketenagakerjaan i. Melampirkan perhitungan sisa kemampuan nyata (SKN) paket pekerjaan j. Melampirkan bukti bayar BPJS ketenagakerjaan 3 bulan terakhir (Juli, Agustus, September 2023) k. Melampirkan laporan keuangan tahun 2021 yang dikeluarkan oleh kantor akuntan public (KAP) yang terdaftar dikementrian keuangan RI yang masih berlaku dengan melampirkan surat keputusan menteri keuangan RI tentang ijin akuntan publik l. Memiliki ISO 9001 : 2015 dan ISO 45001 : 2018 m. Memiliki pengalaman pekerjaan Penyediaan jasa pada divisi 85 paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir baik

	<p>dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak</p> <p>n. Memiliki pengalaman Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup 851 paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak</p>
12	<p>Pertanggungjawaban Keuangan</p> <p>Jika pembayaran imbalan jasa telah dilakukan, penyedia jasa harus membuat pertanggungjawaban keuangan yang didukung dengan bukti pembayaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.</p> <p>Pertanggungjawaban keuangan tersebut di atas menjadi dokumen dasar yang dibutuhkan untuk pencairan anggaran bersama dokumen lainnya yang dibuat dan ditandatangani secukupnya oleh pejabat terkait sesuai ketentuan.</p>
13	<p>Laporan Kemajuan Pekerjaan</p> <p>Penyedia Jasa harus membuat laporan berupa daftar hadir tenaga kerja yang didukung dengan bukti transfer bank serta bukti pembayaran BPJS, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.</p>
14	<p>Nilai Imbalan Jasa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imbalan Jasa yang diberikan kepada tenaga kerja sebesar Rp. 2.850.000,- untuk setiap bulannya, 2. Perhitungan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 6,24% dari imbalan jasa dimana 4.24% ditanggung oleh pengguna jasa dan 2% ditanggung oleh tenaga kerja

Medan, 30 Oktober 2023

Disusun oleh
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BAPENDA PROVSU



MAISARAH, SE
PENATA
NIP. 19790511 200902 2 002